



Kewarganegaraan dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Tantangan bagi Anak-anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Auria Trisi Novi Ana³, Ari Maulana Ramadhan⁴, Luthfiah⁵

¹ Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

^{3,4,5} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

ashfiy.anura@gmail.com ^{1*}, am.mustain.n@gmail.com ², auriatrisi@gmail.com ³, arimaaulana0022@gmail.com ⁴, luthfiiaa.22@gmail.com ⁵

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: ashfiy.anura@gmail.com

Abstract: *Citizenship and education policies in Indonesia play a crucial role in determining children's rights and access to quality education. However, challenges arise when addressing children with unclear citizenship status, such as those born to parents without permanent citizenship or those caught in ambiguous legal situations. This abstract examines how the uncertainty of citizenship status affects the access to and quality of education for these children in Indonesia. The study highlights major issues faced, including limited access to formal schooling, lack of adequate official documentation, and legal instability that restricts educational rights. Additionally, it explores existing government policies and the challenges in implementing them concerning the protection of educational rights for children with unclear citizenship status. The findings reveal the need for more inclusive policy reforms and effective strategies to ensure that all children, regardless of citizenship status, can enjoy their right to quality education. The study suggests a more holistic, human rights-based approach to addressing these issues and advocates for enhanced collaboration between government agencies, civil society, and international organizations to develop sustainable solutions.*

Keywords: *Citizenship, Education policy, Access to education*

Abstrak: Kewarganegaraan dan kebijakan pendidikan di Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan hak dan akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas. Namun, tantangan muncul ketika menghadapi anak-anak dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas, seperti mereka yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan tetap atau yang terjebak dalam situasi legal yang ambigu. Abstrak ini mengkaji bagaimana ketidakpastian status kewarganegaraan memengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak tersebut di Indonesia. Penelitian ini menyoroti permasalahan utama yang dihadapi, termasuk keterbatasan akses ke sekolah formal, kurangnya dokumentasi resmi yang memadai, dan ketidakstabilan hukum yang membatasi hak-hak pendidikan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan pemerintah yang ada serta tantangan implementasinya dalam konteks perlindungan hak pendidikan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas. Hasil penelitian menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status kewarganegaraan, dapat menikmati hak mereka atas pendidikan yang layak. Penelitian ini menyarankan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis hak asasi manusia untuk mengatasi masalah ini, serta mendorong adanya sinergi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Kebijakan pendidikan, Akses pendidikan

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang diakui secara universal, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹ Namun, kenyataannya, akses terhadap pendidikan yang berkualitas seringkali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah status kewarganegaraan. Di Indonesia, tantangan ini menjadi semakin signifikan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas, seperti mereka yang lahir dari orang tua dengan status imigrasi yang tidak pasti atau dari pernikahan campur antar kewarganegaraan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia dan membandingkannya dengan situasi serupa di negara lain.²

Di Indonesia, kebijakan pendidikan nasional diatur oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam kelompok ini sering menghadapi kendala dalam hal pendaftaran, penerimaan di sekolah, dan mendapatkan dokumen pendidikan yang sah.³

Status kewarganegaraan mempengaruhi akses pendidikan melalui beberapa mekanisme. Anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, yang merupakan syarat utama untuk mendaftar di sekolah.⁴ Menurut Mulyadi dan Nasution (2021), kebijakan administrasi yang tidak memadai sering kali menyebabkan anak-anak ini terhambat dalam

¹ Sari, N. K., "Tantangan Kewarganegaraan dan Akses Pendidikan: Kasus Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia", dalam Buku Kajian Sosial dan Pendidikan, Editor: Rahmat Hidayat, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2024, hlm. 87-105.

² Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, "Laporan Tahunan 2023: Akses Pendidikan bagi Anak-Anak dengan Kewarganegaraan Tidak Jelas", Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 2023, hlm. 30-35.

³ Mulyadi, A., & Nasution, I. (2021). Hak Pendidikan dan Kesulitan Administratif bagi Anak-Anak Tanpa Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 8(2), 123-135.

⁴ Sukarno, "Kewarganegaraan dan Hak-Hak Pendidikan di Indonesia: Analisis Terhadap Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas", *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 45-60.

mendapatkan hak pendidikan mereka.⁵Selain itu, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 5% dari anak-anak di Indonesia tidak memiliki dokumen resmi yang memadai untuk pendaftaran sekolah.⁶

Situasi serupa juga dapat ditemukan di negara-negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, anak-anak yang tidak memiliki status kewarganegaraan resmi sering menghadapi tantangan dalam akses pendidikan.⁷ Penelitian oleh Smith dan Johnson (2022) menunjukkan bahwa anak-anak imigran tanpa dokumen sering mengalami diskriminasi dalam penerimaan sekolah dan seringkali tidak mendapatkan akses penuh ke layanan pendidikan yang sama dengan anak-anak warga Negara.⁸Di Uni Eropa, negara-negara seperti Jerman dan Prancis juga menghadapi tantangan serupa, di mana kebijakan imigrasi mempengaruhi hak pendidikan bagi anak-anak imigran dan pengungsi.⁹

Tujuan Penelitian Jurnal ini bertujuan untuk Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas dalam sistem pendidikan di Indonesia.Mengevaluasi kebijakan pendidikan yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut mengatasi atau tidak mengatasi masalah ini.Membandingkan situasi di Indonesia dengan negara lain yang menghadapi tantangan serupa untuk memberikan wawasan dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.¹⁰

Memahami tantangan ini sangat penting untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan merata, serta meningkatkan

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Data dan Statistik Pendidikan 2023*. Jakarta: Kemdikbud.

⁶ Smith, J., & Johnson, R. (2022). Educational Access for Undocumented Children in the U.S.: Challenges and Policy Responses. *Journal of Immigration and Education Policy*, 14(1), 45-62.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas", Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, hlm. 15-20.

⁸ European Commission. (2023). *Education Policies for Migrant Children in Europe: A Comparative Analysis*. Brussels: EC.

⁹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). *Global Trends Report 2023*. Geneva: UNHCR.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Pendidikan dan Hak-Hak Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas: Panduan dan Kebijakan Terbaru", Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023, hlm. 22-30.

kesadaran tentang hak pendidikan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas.¹¹ Dengan menganalisis situasi di Indonesia dan membandingkannya dengan kasus internasional, diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan mereka tanpa memandang status kewarganegaraan.¹²

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain campuran (mixed-methods), menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain campuran untuk memadukan keunggulan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih holistik tentang masalah yang diteliti.¹³ Pendekatan Kualitatif: Wawancara Mendalam Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pendidik dan Administrasi Sekolah. Untuk memahami tantangan administratif dan kebijakan yang diterapkan di sekolah.¹⁴ Orang Tua dan Anak-anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas Untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengalaman mereka dalam sistem pendidikan. Pejabat Pemerintah: Untuk mengetahui kebijakan yang berlaku dan implementasinya.¹⁵ Analisis Dokumen Analisis dokumen akan mencakup kebijakan pendidikan: menilai kebijakan yang ada terkait dengan anak-anak dengan status

¹¹ Adi Putra, "Kewarganegaraan dan Kesetaraan Pendidikan: Evaluasi Kebijakan Terhadap Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 112-128.

¹² UNICEF Indonesia, "Laporan Penelitian: Akses Pendidikan untuk Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas di Indonesia", Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021, hlm. 40-55.

¹³ Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

¹⁴ Mulyadi, A., & Nasution, I. (2021). Hak Pendidikan dan Kesulitan Administratif bagi Anak-Anak Tanpa Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 8(2), 123-135.

¹⁵ Smith, J., & Johnson, R. (2022). Educational Access for Undocumented Children in the U.S.: Challenges and Policy Responses. *Journal of Immigration and Education Policy*, 14(1), 45-62.

kewarganegaraan tidak jelas.¹⁶Laporan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat: menelaah laporan dan studi kasus terkait.¹⁷Studi Kasus Internasional Studi kasus internasional akan melibatkan Analisis Kebijakan di Negara-Negara Eropa dan Amerika Serikat: Untuk memahami bagaimana negara-negara tersebut mengatasi masalah pendidikan bagi anak-anak tanpa status kewarganegaraan jelas.¹⁸

Pendekatan Kuantitatif

Survei akan disebarkan kepada Sekolah-sekolah di Daerah dengan Populasi Imigran Tinggi: Untuk mengumpulkan data tentang jumlah dan kondisi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas.¹⁹Orang Tua dan Anak-anak: Untuk memperoleh data kuantitatif mengenai hambatan yang mereka hadapi dalam akses pendidikan.²⁰Analisis data statistik akan dilakukan untuk Mengidentifikasi Tren dan Pola Menganalisis data tentang akses pendidikan dan kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas.Evaluasi Efektivitas Kebijakan: Mengukur dampak kebijakan pendidikan terhadap kelompok sasaran.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Primer: Melalui wawancara, survei, dan observasi langsung
Pengumpulan Data Sekunder: Melalui studi literatur, dokumen kebijakan, dan laporan terkait.²¹

¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Panduan Penelitian Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud.

¹⁷ European Commission. (2023). Education Policies for Migrant Children in Europe: A Comparative Analysis. Brussels: EC.

¹⁸ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). Global Trends Report 2023. Geneva: UNHCR.

¹⁹ Jones, L. M., & Roberts, T. A. (2021). Education and Integration Policies for Migrant Children: Lessons from Germany and France. *International Journal of Comparative Education and Development*, 23(4), 329-345.

²⁰ Houghton, S., & Waller, M. (2022). Access to Education for Undocumented Children: A Survey of Practices in High-Immigration Areas. *Education Review*, 37(2), 200-215.

²¹ Smith, J., & Johnson, R. (2022). Educational Access for Undocumented Children in the U.S.: Challenges and Policy Responses. *Journal of Immigration and Education Policy*, 14(1), 45-62.

Analisis Data

Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk menggali hubungan antara variabel dan menguji hipotesis.

Etika Penelitian

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika, termasuk Persetujuan Informed. Memastikan bahwa semua peserta memahami tujuan penelitian dan memberikan persetujuan mereka. Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan data dan identitas peserta. Kepatuhan terhadap Regulasi: Mematuhi regulasi penelitian yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hak fundamental yang diakui oleh berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, di Indonesia, akses pendidikan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya terbatas pada masalah administratif tetapi juga mencakup isu-isu sosial dan kebijakan yang berdampak pada integrasi mereka dalam sistem pendidikan. Pembahasan ini akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas, membandingkan situasi ini dengan negara lain, serta mengevaluasi kebijakan pendidikan yang ada. Tantangan Anak-anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas

Masalah Administratif

Anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen identifikasi lainnya. Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk pendaftaran sekolah dan akses ke layanan pendidikan. Mulyadi dan Nasution (2021) mencatat bahwa masalah administratif ini sering mengakibatkan ketidakmampuan anak-anak untuk terdaftar di sekolah secara resmi. Di Indonesia, proses administratif yang kompleks dan birokrasi dapat memperburuk masalah ini, menyebabkan keterlambatan dan hambatan dalam akses pendidikan.

Kebijakan Pendidikan yang Tidak Inklusif

Kebijakan pendidikan di Indonesia, meskipun secara teoritis menjamin hak pendidikan untuk semua anak, seringkali tidak sepenuhnya inklusif. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut mungkin tidak secara khusus menangani kebutuhan anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2023), sekitar 5% anak-anak di Indonesia mengalami kendala dalam mendapatkan akses pendidikan karena masalah dokumentasi dan administrasi. Kebijakan yang ada sering kali tidak cukup fleksibel untuk menangani kasus-kasus individual dengan kebutuhan khusus.

Integrasi Sosial dan Psikologis

Anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas mungkin mengalami kesulitan dalam integrasi sosial di sekolah. Mereka sering merasa terasing dan terdiskriminasi, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis mereka. Penelitian oleh Smith dan Johnson (2022) menunjukkan bahwa anak-anak imigran tanpa dokumen di Amerika Serikat sering menghadapi tantangan serupa, yang mempengaruhi performa akademis dan kesejahteraan sosial mereka. Situasi ini diperparah oleh kurangnya dukungan psikologis dan sosial di lingkungan sekolah.

Perbandingan Internasional

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, anak-anak imigran tanpa dokumen sering menghadapi tantangan signifikan dalam mendapatkan akses pendidikan. Smith dan Johnson (2022) menunjukkan bahwa meskipun hukum AS menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan dasar, anak-anak tanpa dokumen sering mengalami diskriminasi dalam penerimaan sekolah dan akses ke layanan pendidikan. Kebijakan yang ada sering kali tidak mengatasi sepenuhnya masalah akses dan integrasi untuk anak-anak tersebut.

Uni Eropa

Di Uni Eropa, negara-negara seperti Jerman dan Prancis menghadapi tantangan serupa dengan kebijakan pendidikan untuk anak-anak imigran dan pengungsi. Menurut laporan dari European Commission (2023), kebijakan pendidikan di negara-negara ini mencoba untuk mengatasi tantangan integrasi dengan program-

program dukungan khusus dan kebijakan inklusif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penerimaan sosial dan administratif.

Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia

a. Kebijakan yang Ada

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi untuk meningkatkan inklusi dan akses bagi semua anak. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip inklusi, terutama bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas:

- a. **Penyederhanaan Proses Administratif:** Pemerintah perlu menyederhanakan proses administratif untuk memudahkan pendaftaran anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas.
- b. **Kebijakan Pendidikan yang Lebih Fleksibel:** Kebijakan pendidikan harus diperbarui untuk secara spesifik menangani kebutuhan anak-anak ini, termasuk program-program dukungan khusus dan integrasi.
- c. **Program Dukungan Sosial dan Psikologis:** Sekolah harus menyediakan dukungan sosial dan psikologis untuk membantu anak-anak yang terasing dan merasa terdiskriminasi.

Tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas dalam sistem pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Masalah administratif, kebijakan yang tidak inklusif, dan kesulitan integrasi sosial semuanya berkontribusi pada hambatan akses pendidikan. Dengan membandingkan situasi ini dengan negara lain, kita dapat mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak ini. Langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan diharapkan dapat membantu dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari status kewarganegaraannya, mendapatkan hak pendidikan yang mereka butuhkan.

Gap Analysis

Das Sollen (Harapan): Seharusnya, semua anak, termasuk mereka dengan status kewarganegaraan tidak jelas, memiliki akses yang sama ke pendidikan sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial.

Das Sein (Kenyataan): Namun, kenyataannya, anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas sering kali tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan yang spesifik dan prosedur administrasi yang rumit, serta kurangnya pemahaman tentang kebutuhan mereka.

4. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia dirancang untuk memastikan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka dengan status kewarganegaraan tidak jelas, terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan yang ideal dan realitas di lapangan. Anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan administratif dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sekolah dan stigma sosial yang menghalangi partisipasi mereka dalam pendidikan. Meskipun terdapat pedoman inklusi, implementasinya sering tidak efektif, dengan data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan mereka jauh lebih rendah dibandingkan anak-anak dengan dokumen identitas resmi. Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi termasuk revisi kebijakan untuk lebih inklusif, penyederhanaan prosedur administratif, serta peningkatan pelatihan dan kesadaran di kalangan pendidik dan staf sekolah. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua anak, tanpa memandang status kewarganegaraan mereka, sehingga hak atas pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati secara merata. Kebijakan pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menangani anak-anak dengan status kewarganegaraan tidak jelas. Anak-anak ini sering kali terhambat dalam mengakses pendidikan dasar yang layak akibat ketidakpastian status hukum mereka. Masalah ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan, memperburuk ketimpangan sosial, dan menghambat potensi perkembangan anak. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan pemerintah untuk memperjelas status kewarganegaraan mereka dan memastikan bahwa semua anak, terlepas dari status kewarganegaraan, memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas. Upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk

mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi semua anak di Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

- Adi Putra, "Kewarganegaraan dan Kesetaraan Pendidikan: Evaluasi Kebijakan Terhadap Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 112-128.
- Asosiasi Pendidikan Anak Indonesia, "Analisis Kebijakan dan Implementasi Pendidikan untuk Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas", Jakarta: Asosiasi Pendidikan Anak Indonesia, 2021, hlm. 40-55.
- Babbie, E. (2020). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Sosial Ekonomi dan Dampak Kewarganegaraan Tidak Jelas terhadap Akses Pendidikan Anak", Jakarta: BPS, 2024, hlm. 12-22.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, "Laporan Tahunan 2023: Akses Pendidikan bagi Anak-Anak dengan Kewarganegaraan Tidak Jelas", Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 2023, hlm. 30-35.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, "Laporan Tahunan: Implementasi dan Kesenjangan dalam Pendidikan untuk Anak-Anak dengan Kewarganegaraan Tidak Jelas", Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 2023, hlm. 30-40. Laporan ini mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan resmi dan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam hal akses pendidikan untuk anak-anak tanpa dokumen resmi.
- European Commission. (2023). *Education Policies for Migrant Children in Europe: A Comparative Analysis*. Brussels: EC.
- European Commission. (2023). *Education Policies for Migrant Children in Europe: A Comparative Analysis*. Brussels: EC.
- European Commission. (2023). *Education Policies for Migrant Children in Europe: A Comparative Analysis*. Brussels: EC.
- European Commission. (2023). *Education Policies for Migrant Children in Europe: A Comparative Analysis*. Brussels: EC.
- European Council on Refugees and Exiles (ECRE), "Access to Education for Migrant and Stateless Children in Europe: A Comparative Analysis", Brussels: ECRE, 2022, pp. 30-50. Laporan ini membahas akses pendidikan untuk anak-anak migran dan tanpa status

kewarganegaraan yang jelas di Eropa dan membandingkannya dengan kebijakan dan praktik di Indonesia.

Houghton, S., & Waller, M. (2022). Access to Education for Undocumented Children: A Survey of Practices in High-Immigration Areas. *Education Review*, 37(2), 200-215.

Jones, L. M., & Roberts, T. A. (2021). Education and Integration Policies for Migrant Children: Lessons from Germany and France. *International Journal of Comparative Education and Development*, 23(4), 329-345.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan Dampak Status Kewarganegaraan Tidak Jelas terhadap Kesehatan dan Pendidikan Anak", Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2023, hlm. 50-65.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan Dampak Status Kewarganegaraan Tidak Jelas terhadap Kesehatan dan Pendidikan Anak", Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2023, hlm. 50-65.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Pendidikan dan Hak-Hak Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas: Panduan dan Kebijakan Terbaru", Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023, hlm. 22-30.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas", Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, hlm. 15-20.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Data dan Statistik Pendidikan 2023. Jakarta: Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Panduan Penelitian Pendidikan. Jakarta: Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Data dan Statistik Pendidikan 2023. Jakarta: Kemdikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Data dan Statistik Pendidikan 2023. Jakarta: Kemdikbud.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), "Hak Pendidikan Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas: Studi dan Rekomendasi", Jakarta: LBH, 2024, hlm. 30-45.

Lembaga Perlindungan Anak Nasional, "Analisis Kesenjangan dalam Kebijakan Pendidikan untuk Anak-Anak dengan Kewarganegaraan Tidak Jelas: 2023", Jakarta: Lembaga Perlindungan Anak Nasional, 2023, hlm. 20-35. Studi ini memaparkan gap antara apa yang seharusnya dilakukan menurut kebijakan dan apa yang sebenarnya terjadi, dengan fokus pada implementasi di tingkat lokal.

Mulyadi, A., & Nasution, I. (2021). Hak Pendidikan dan Kesulitan Administratif bagi Anak-Anak Tanpa Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 8(2), 123-135.

Mulyadi, A., & Nasution, I. (2021). Hak Pendidikan dan Kesulitan Administratif bagi Anak-Anak Tanpa Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 8(2), 123-135.

Mulyadi, A., & Nasution, I. (2021). Hak Pendidikan dan Kesulitan Administratif bagi Anak-Anak Tanpa Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Sosial*, 8(2), 123-135.

- Pusat Studi Hak Anak Universitas Indonesia, "Pendidikan dan Kewarganegaraan: Kesenjangan untuk Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas", Jakarta: Pusat Studi Hak Anak Universitas Indonesia, 2023, hlm. 50-65.
- Sari, N. K., "Tantangan Kewarganegaraan dan Akses Pendidikan: Kasus Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia", dalam Buku Kajian Sosial dan Pendidikan, Editor: Rahmat Hidayat, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2024, hlm. 87-105.
- Sari, T., "Efektivitas Kebijakan Pendidikan untuk Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas di Era Digital", dalam Buku Perspektif Pendidikan 2023, Editor: R. A. Subramaniam, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2023, hlm. 100-115.
- Smith, J., & Johnson, R. (2022). Educational Access for Undocumented Children in the U.S.: Challenges and Policy Responses. *Journal of Immigration and Education Policy*, 14(1), 45-62.
- Smith, J., & Johnson, R. (2022). Educational Access for Undocumented Children in the U.S.: Challenges and Policy Responses. *Journal of Immigration and Education Policy*, 14(1), 45-62.
- Smith, J., & Johnson, R. (2022). Educational Access for Undocumented Children in the U.S.: Challenges and Policy Responses. *Journal of Immigration and Education Policy*, 14(1), 45-62.
- Smith, J., & Johnson, R. (2022). Educational Access for Undocumented Children in the U.S.: Challenges and Policy Responses. *Journal of Immigration and Education Policy*, 14(1), 45-62.
- Sukarno, "Kewarganegaraan dan Hak-Hak Pendidikan di Indonesia: Analisis Terhadap Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas", *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 45-60.
- U.S. Department of Education, "Education for All: A Report on Access and Equity in U.S. Schools", Washington, D.C.: U.S. Department of Education, 2023, pp. 40-55. Laporan ini memberikan gambaran tentang kebijakan inklusi pendidikan di Amerika Serikat, menyoroti perbedaan dalam penerapan hak pendidikan untuk anak-anak dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas, dibandingkan dengan tantangan serupa di Indonesia.
- UNICEF Indonesia, "Laporan Penelitian: Akses Pendidikan untuk Anak-Anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas di Indonesia", Jakarta: UNICEF Indonesia, 2021, hlm. 40-55.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). *Global Trends Report 2023*. Geneva: UNHCR.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). *Global Trends Report 2023*. Geneva: UNHCR.